



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 April 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS GADJAH MADA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ARIEF BUDIMAN  
2. Jabatan : KETUA PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI TEKNIK SISTEM  
3. NHK : 1014616

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.710.000.000

1. Tanah Seluas 247 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI  
Rp. 460.000.000  
2. Tanah Seluas 225 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI  
Rp. 750.000.000  
3. Tanah Seluas 125 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI  
Rp. 500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 242.000.000

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.  
230.000.000  
2. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.  
12.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.111.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 3.063.000.000

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.063.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.